

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 8 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Pengelolaan keuangan harus mengacu Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah dilakukan perubahan yang kedua yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Implementasi berdasarkan Permendagri tersebut, menteri dalam negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sesuai dengan Peraturan tersebut dijelaskan bahwa prosedur akuntansi yang diterapkan dalam lingkungan pemerintah daerah meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi aset, dan akuntansi selain kas.

Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011, prosedur akuntansi penerimaan kas atau pendapatan di SKPD adalah serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang terkait dengan transaksi pendapatan dan penyeterannya, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sedangkan prosedur akuntansi pengeluaran kas atau belanja di SKPD menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 adalah serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi, dimulai dari pencatatan transaksi serta pengikhtisarannya sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan belanja, di SKPD. Sistem informasi akuntansi, struktur organisasi dan penempatan pegawai yang tepat sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi atau instansi. Kegiatan ini dapat digunakan untuk mencegah adanya penyelewengan, penggelapan, penipuan serta memperkecil terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi akuntansi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku secara umum. Setiap transaksi dari kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagian besar melibatkan kas.

Menurut Ismail (2011:138) kas merupakan mata uang yang berupa kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan kas dapat dipengaruhi oleh 2 aktivitas yaitu penerimaan dan pengeluaran kas. Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas merupakan suatu alat untuk mengkoordinasi semua aktivitas agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Salah satu cara yang ditempuh untuk melaksanakan prosedur yang baik adalah penyusunan sistem penerimaan dan pengeluaran berdasarkan peraturan yang berlaku. Sistem tersebut juga dirancang dan dibuat untuk menghasilkan pengendalian internal yang baik.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dijelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Menurut peraturan tersebut, Sistem Pengendalian Intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal yang memadai, diharapkan dapat menekan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang disertai dengan pemalsuan catatan akuntansi dan penyalahgunaan wewenang dapat segera diketahui dan diatasi. Perubahan organisasi pemerintah yang terjadi saat ini telah disesuaikan dengan berbagai tuntutan pelayanan masyarakat. Perubahan organisasi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan manajemen keuangan daerah sehingga mudah dikontrol dan diawasi. Salah satu instansi tersebut yaitu Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membutuhkan sarana pengendalian internal agar seluruh kegiatannya terarah kepada pencapaian tujuan yang ditetapkan. Salah satu sarana yang dapat digunakan manajemen untuk mengarahkan anggota organisasinya di dalam bidang keuangan adalah pengendalian internal terhadap kas, baik sistem dan prosedur penerimaan maupun sistem dan prosedur pengeluaran. Sistem pengendalian internal diharapkan dapat berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur penyajian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal. Pengembangan unsur sistem pengendalian

internal perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal pemerintah dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, masih ditemukan beberapa isu strategis atau fenomena yang belum ditangani pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Salah satu fenomena tersebut yakni sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual yang masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Pengelolaan keuangan tersebut berdasarkan sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Hal ini dapat diketahui dari lemahnya kesadaran wajib pajak, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Mengerucutkan pembahasan, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sumber utama PAD di BPPKAD Kabupaten Magetan diperoleh dari Pajak Daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan roda pemerintahan. Selain itu, jumlah pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Magetan yang sangat terbatas menyebabkan banyak pegawai yang mempunyai tugas rangkap. Karena hal tersebut masih berpotensi pada tidak kesesuaian antara Permendagri No. 21 Tahun 2011 dengan penerapan di BPPKAD Kabupaten Magetan. Penelitian perlu dilakukan terhadap permasalahan yang terjadi untuk mewujudkan tercapainya perbaikan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas yang dapat meningkatkan pengendalian internal pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan.

Penelitian tentang sistem informasi akuntansi telah banyak dilakukan oleh para peneliti, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dwi Agustyawati (2019), hasil dari penelitian ini yaitu sistem informasi akuntansi penerimaan kas telah dilengkapi dengan dokumen, telah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Sistem dan prosedur pengeluaran kas di Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau sudah efektif, hal ini dilihat dari penyelesaian Surat Perintah Membayar (SPM) yang masuk di Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 hari dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sendytha Eunike Wowor, Herman Karamoy, dan Harijanto (2015), hasil dari penelitian ini yaitu Penerapan sistem pengendalian kas mulai dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pada DPPKAD Kota Tomohon sudah dilaksanakan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Inna Rizky Amelia (2017), hasil dari penelitian ini yaitu sistem dan prosedur penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dimulai dari wajib pajak memberikan Surat Ketetapan Wajib Pajak (SKP Daerah) sampai menyetorkan pajak secara langsung ke bank dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah juga telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian lain dilakukan oleh Irawan (2018) yang memperoleh hasil sistem pengendalian intern kas yang diterapkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu khususnya pengendalian intern pengeluaran kas sudah baik dan efektif sesuai PP No. 60 Tahun 2008. Hal tersebut ditandai dengan struktur organisasi telah menunjukkan pembagian tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab yang jelas dan tepat, pemeriksaan pengeluaran kasnya sekali dalam sebulan dan pada akhir tahun dilakukan pengawasan ekstern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Sedangkan pencatatan akuntansi pengeluaran kas juga terlaksana dengan baik, setiap transaksi yang dicatat ke dalam pembukuan akan berhasil mengurangi terjadinya penyalahgunaan kas dan sistem otorisasi atas terjadinya transaksi yang menyangkut kas dari bagian keuangan dan pimpinan instansi terlaksana dengan baik.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khaliza Ramadhani (2018) dengan hasil yakni Sistem Informasi Akuntansi pada PDAM Tirta Tamiang tergolong sudah baik sehingga dapat berperan dalam peningkatan pengendalian internal penerimaan kas, namun ada beberapa bagian yang

masih berjalan menggunakan sistem manual. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya kesalahan terhadap data internal perusahaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada arah pembahasannya. Penelitian sebelumnya fokus terhadap analisis penerimaan kas dan pengeluaran kas berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis penerimaan dan pengeluaran kas dalam meningkatkan pengendalian internal. Penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas sangat penting dilakukan dan berperan dalam kelancaran kegiatan operasional di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, agar terstruktur dan terorganisir aktivitas keuangan tersebut. Maka dibutuhkan suatu prosedur agar mempermudah kegiatan, fungsi yang terkait, dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan, bagan alir dalam sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas serta pengendalian internal yang terbentuk dari proses tersebut. Sistem pengendalian yang baik diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan dengan benar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini memberikan keterkaitan analisis akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dengan sistem pengendalian internal Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Atas dasar penjelasan tersebut, maka penelitian ini mengambil judul **“Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dalam Meningkatkan Pengendalian Internal pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan?
- b. Bagaimana tingkat kesesuaian sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?
- c. Bagaimana tingkat kesesuaian sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?

- d. Bagaimana peningkatan pengendalian internal di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan berdasarkan capaian tingkat kesesuaian indikator penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan.
- b. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- d. Untuk mengetahui peningkatan pengendalian internal di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan berdasarkan capaian tingkat kesesuaian indikator penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak diantaranya adalah:

- a. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi sehingga dapat menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dalam Meningkatkan Pengendalian Internal.

- b. Bagi BPPKAD Kabupaten Magetan

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai solusi dalam pemecahan masalah oleh pihak instansi, sehingga tujuan manajemen dapat tercapai.

- c. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini memenuhi syarat bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana strata satu di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dan dengan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah wawasan dan pengetahuan terhadap Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dalam Meningkatkan Pengendalian Internal.

d. Bagi penelitian yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi kepada peneliti selanjutnya yang sejenis.

